

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, baik BNN, Bea Cukai, Polres dan Imigrasi di Kabupaten Belu telah berkolaborasi dan melakukan berbagai upaya dalam menangani penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan. BNN Kabupaten Belu telah berupaya menangani dengan pencegahan seperti sosialisasi, pembentukan penggiat anti narkoba dan kerja sama dengan Timor Leste, pemberantasan dan melakukan penyelidikan, serta penangulangan korban dengan rehabilitasi. Sedangkan Polres Belu lebih berfokus pada pengawasan dan pemberantasan baik di jalur laut maupun darat. Kepolisian Belu juga telah melakukan kerja sama dengan TNI, petugas perbatasan dan kepolisian Timor Leste di perbatasan demi menjaga keamanan di wilayah perbatasan maupun di jalur ilegal. Bea Cukai yang berfokus pada keluar masuknya barang berupaya melakukan pemcegahan menggunakan mesin X-ray selain di darat Bea Cukai juga melakukan patroli laut yang rutin dilakukan. Dan dari pihak Imigrasi, walaupun tidak memiliki wewenang untuk menindak narkoba di perbatasan secara langsung namun jika melihat seseorang yang mencurigakan dan memiliki riwayat menyelundupi narkoba, maka pihak Imigrasi dapat mencegah masuknya individu dan memberikan laporan pada pihak yang berwenang seperti BNN dan Polri.

Dari upaya upaya yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah ada kerja sama yang baik yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan narkoba di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, namun masih juga terdapat hambatan dan kekurangan yang dapat dibuktikan dengan masih adanya kasus penemuan penyelundupan di wilayah perbatasan dalam sepuluh tahun terakhir, keterbatasan personel, luasnya wilayah perbatasan, dan modus penyelundupan yang semakin variatif dan berubah-ubah.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan penyelundupan narkoba di perbatasan Kabupaten Belu, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) dengan menambah jumlah pekerja di lapangan, khususnya di jalur-jalur rawan seperti "jalan tikus" dan wilayah laut. Selain itu, minimnya infrastruktur di jalur rawan juga merupakan kekurangan yang masih perlu di perhatikan. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti penambahan alat canggih, kendaraan patroli, drone, serta sistem pengawasan berbasis teknologi di titik-titik strategis perbatasan mengingat berubah-ubahnya modus yang digunakan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dengan memperkuat perlindungan petugas di lapangan, selain kepolisian, misalnya dengan melengkapi mereka dengan alat pelindung diri yang memadai. Selanjutnya, kolaborasi dan kerja sama antar lembaga perlu terus diperkuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.